

EVALUASI PELAKSANAAN KESIAPSIAGAAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Sela Pebri Valentina

NPP.31.0388

Asdaf Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: selafebrivalentina@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Muh Ilham, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Extreme global climate change can cause disasters such as floods that can harm humans and become a challenge including in Bandung Regency because it can harm the community such as the impact of casualties and property. The Bandung Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) participates in handling all disasters that occur in Bandung Regency by reducing disaster risk through prevention and preparedness.

Purpose: The purpose of this study was to determine the Evaluation of the Implementation of Flood Disaster Preparedness in Bandung Regency, West Java Province. **Method:** This research uses descriptive qualitative methods with an inductive approach and evaluation using William N. Dunn's theory. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques with data reduction, data presentation, data verification and making conclusions. **Result:** The implementation of flood disaster preparedness in Bandung Regency is said to be going well with the implementation of disaster-prone information service programs, disaster prevention and preparedness services and rescue and evacuation services for disaster victims, although it is still constrained by limited facilities and infrastructure, lack of Human Resources (HR) and limited dissemination of disaster information to the community. **Conclusion:** The implementation of flood disaster preparedness in Bandung Regency in terms of effectiveness, accuracy, efficiency, equity, adequacy and responsiveness can be said to be good, this is supported by the role of the government as well as the entire role of the pentahelix. In order to improve flood disaster preparedness, it is necessary to recruit and train human resources, maintain facilities and infrastructure and increase the dissemination of information and communication.

Keywords: Flood Disaster, Evaluation, Preparedness

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Perubahan iklim global yang cukup ekstrem dapat terjadi bencana seperti bencana banjir yang dapat merugikan manusia dan menjadi tantangan termasuk di Kabupaten Bandung karena dapat merugikan masyarakat seperti dampak korban jiwa dan harta benda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung turut serta menangani seluruh bencana yang terjadi di Kabupaten Bandung dengan mengurangi risiko bencana melalui pencegahan dan kesiapsiagaan. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan evaluasi menggunakan teori William N. Dunn. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan membuat kesimpulan. **Hasil/Temuan:**

Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan bencana banjir di Kabupaten Bandung dikatakan berjalan baik dengan dilakukannya program pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana meskipun masih terkendala sarana dan prasarana terbatas, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan terbatasnya penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat. **Kesimpulan:** Pelaksanaan kesiapsiagaan bencana banjir di Kabupaten Bandung dari segi efektivitas, ketepatan, efisiensi, pemerataan, kecukupan dan responsivitas bisa dikatakan baik, hal ini didukung dengan peran pemerintah juga seluruh peran pentahelik. Guna meningkatkan kesiapsiagaan bencana banjir perlu melakukan perekrutan dan pelatihan SDM, Perawatan sarana dan prasarana dan peningkatan penyebaran informasi dan komunikasi.

Kata Kunci : Bencana Banjir, Evaluasi, Kesiapsiagaan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang letak geografis sangat strategis. Indonesia berada diantara dua benua dengan dua Samudra, bagian barat dari Indonesia berbatasan dengan benua Asia, bagian tenggara berbatasan dengan benua Australia, dan perairan bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudera Hindia, perairan bagian timur Indonesia berbatasan dengan Samudera Pasifik.

Letak astronomis Indonesia 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT berada pada sepanjang garis khayal khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis yang menerima cahaya matahari sepanjang waktu sehingga hanya dilanda dua musim, antara lain musim kemarau dan musim penghujan dan tingginya curah hujan menyebabkan kelembaban udara rata rata yang tinggi (detik.com).

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam atau manusia sehingga menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana).

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana banjir menjadi bencana yang sering terjadi di Indonesia dengan jumlah kejadian sebanyak 1.531 kejadian bencana. Kondisi geografi, topografi dan juga dengan berbagai faktor menjadikan Indonesia memiliki tanah yang subur. Salah satu faktor yang menjadi ancaman yaitu Indonesia berada pada wilayah beriklim tropis yang mengakibatkan perubahan iklim global yang cukup ekstrem. Perubahan cuaca yang ekstrem ini mengakibatkan dapat terjadinya bencana yang merugikan manusia seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, pohon tumbang, dan kebakaran hutan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat total 3.544 kejadian bencana yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022, dengan didominasi kejadian bencana banjir yang paling tinggi sebanyak 1.531 kejadian di sepanjang tahun 2022 terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022 menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD).

Kompleksitas struktur geologi yang dimiliki Provinsi Jawa Barat disebabkan oleh daerah pegunungan yang terdapat di bagian tengah dan selatan, serta di wilayah utara berupa daratan rendah. Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi risiko bencana yang tinggi dikarenakan kepadatan penduduk dan kompleksitas kondisi geografis wilayah Jawa Barat (BPS Jawa Barat, 2022). Adapun jumlah penduduk total provinsi Jawa Barat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat pada Tahun 2022 yakni 49,405 juta jiwa.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Jawa Barat mengalami jumlah kejadian bencana banjir yang meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2021 dan kemudian mengalami penurunan di tahun 2022. Walaupun bencana banjir yang

terjadi mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022, tidak menutup kemungkinan bencana banjir akan mengalami peningkatan kembali dikarenakan topografi yang dimiliki Provinsi Jawa Barat kontur tanah yang bersifat lembek dan mudah menyerap air, juga curah hujan yang tinggi (Open Data Jawa Barat, 2023).

Berdasarkan, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022, Provinsi Jawa Barat memiliki indeks risiko 131,62 (sedang) dan termasuk juga daerah Kabupaten Bandung memiliki indeks risiko bencana yang tinggi. Ditinjau dari data diatas, empat (4) kota/kabupaten dengan indeks risiko bencana tertinggi di provinsi Jawa Barat ialah Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Garut. Sementara Kabupaten Bandung menempati urutan ke – 8 dengan indeks risiko bencana tinggi di provinsi Jawa Barat. Dengan indeks risiko bencana tinggi, Kabupaten Bandung wajib waspada terhadap segala risiko bencana yang dapat terjadi.

Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Bandung bencana banjir di Kabupaten Bandung mengalami kejadian yang fluktuatif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2020 bencana banjir di Kabupaten Bandung sebanyak 100 kejadian lalu mengalami kenaikan jumlah kejadian bencana banjir pada tahun 2021 sebanyak 111 kejadian kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 dimana kejadian banjir terjadi sebanyak 93 kejadian di Kabupaten Bandung.

Jika ditinjau berdasarkan kondisi bencana menurut data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung sering mengalami bencana pada tahun 2022 adalah bencana longsor, sementara bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi setelah bencana longsor akan tetapi, bencana banjir menjadi bencana yang paling banyak menimbulkan korban. Sebanyak 14.264 keluarga dan juga 47.141 korban yang terkena dampak dari bencana banjir.

Ditinjau dari permasalahan dan isu strategis dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Bandung tahun 2021 – 2026 dalam bab IV sub materi Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dijelaskan bahwa kabupaten Bandung masih perlu meningkatkan pencegahan kebencanaan, pelayanan penanggulangan kebencanaan dan juga belum optimalnya upaya mitigasi bencana dikarenakan regulasi mitigasi bencana masih belum optimal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu, baik dalam konteks kesiapsiagaan maupun penanganan bencana banjir. Penelitian pertama dilakukan oleh Agus Taryana, Muhammad Rifa El Mahmudi dan Herjanto Beki (2022) berjudul Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Jakarta, Temuan pada penelitian ini dimana DKI Jakarta dianggap memiliki risiko bencana banjir paling tinggi. Dalam hal kesiapsiagaan bencana banjir di DKI Jakarta, diperlukan kegiatan dalam memenuhi 5 (lima) parameter kesiapsiagaan untuk menentukan bahwa DKI Jakarta siap dalam menghadapi bencana banjir. Penelitian kedua oleh Esi Esriani (2022) berjudul Kesiapsiagaan Santri Tingkat Tsanawi dalam Menghadapi Bencana Alam Gempa Bumi di Lingkungan Pondok Pesantren Riyadlul Huda Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, hasil penelitian diketahui dari hasil tes peranan pesantren dalam memberikan pengetahuan, sarana prasarana, mobilitas suber daya manusia dan kebijakan menghasilkan tingkat pengetahuan santri masih rendah dan tingkat kesiapsiagaan santri tingkat tsanawi di Pondok Pesantren Riyadlul Huda dalam kategori kurang siap. Penelitian ketiga dilakukan oleh Ian Hot Oloan Sitorus, Filsa Bioresita, Noorlaila Hayati (2021) mengenai Analisa Tingkat Rawan Banjir di Daerah Kabupaten Bandung Menggunakan Metode Pembobotan Dan Scoring menghasilkan validasi yang menunjukkan bahwa seluruh kecamatan yang disebutkan dalam Peta Wilayah Siaga Darurat Bencana Banjir merupakan daerah yang tergolong kelas sangat Rawan pada Peta Rawan Banjir. Penelitian keempat yaitu Manajemen Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Potensi Bencana di Kabupaten Sumedang oleh Ida Yunari

Ristiani (2020) dengan temuan Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Sumedang pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik, namun perlu lebih meningkatkan lagi dalam menghadapi potensibencana yang didukung oleh pengalokasian dana yang cukup sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dan sinergitas dari berbagai lapisan. Penelitian kelima oleh Adila Nabilah (2020) mengenai Identifikasi Tingkat Kerawanan Bencana Banjir Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, ditemukan dengan menilai lima parameter dengan menganalisis topografi/ketinggian lahan Baleendah yang terdapat 1 kategori yaitu berbukit-pegunungan karena ketinggian permukaan lebih dari 300 yaitu dari yang terendah 698 mdpl sampai tertinggi 1037 mdpl. Penelitian keenam oleh Sukma Agus Dori (2020) berjudul Identifikasi Wilayah Rawan Genangan Banjir, Penyebab dan Upaya Penanggulangannya di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman. Temuan dalam penelitian adalah Nagari Campago termasuk daerah yang dapat dikategorikan sebagai daerah yang rawan banjir karena terlalu dangkalnya saluran utama sungai akibat sampah. Penelitian ketujuh mengenai Mitigasi Bencana Banjir Secara Terpadu dan Kolaboratif oleh Satria Surya Armando dan Lukman Arif (2023), temuan dalam penelitian ini di Kabupaten Sidoarjo upaya mitigasi bencana telah dilakukan akan tetapi kurang maksimal karena terdapat kegiatan yang belum berjalan dengan baik. Penelitian kedelapan oleh Rosan Cahya Utami dan Wido Prananing Tyas (2021) Bentuk Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam Banjir Bandang Suku Wana Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah. Temuan dalam penelitian Suku Wana memiliki beragam aktivitas kesiapsiagaandalammenghadapi bencanabanjir, yang telah memenuhi kriteria penerapan kesiapsiagaan bencana ideal menurut literatur. Penelitian yang kesembilan Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Banjir di Kelurahan Wosi Manokwari Papua Barat oleh Nur Alzair dan Erikha Maurizka Mayzarah (2022). Temuan dalam penelitian pengetahuan masyarakat 63, 1% terkategori sedang dan 36,9% terkategori tinggi serta tidak ada yang terkategori rendah. Kesiapsiagaan masyarakat terhadap banjir 14, 3% terkategori rendah dan 85, 7% terkategori sedang serta tidak ada yang terkategori tinggi. Penelitian yang kesepuluh oleh Andri Fransiskus Gultom, Ludovikus Bomans Wadu dan Fahmi Arif Zakaria mengenai Strategi Warga Negara dalam Upaya Pencegahan Bencana Banjir di Desa Tawangrejeni, Turen, Kabupaten Malang. Strategi warga negara dengan demikian ini berupaya mencegah terjadinya bencana banjir di desa Tawang rejeni dengan cara terjun langsung untuk membantu memaksimalkan kegiatan gotong royong sebagai wujud solidaritas sosial.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pelaksanaan kesiapsiagaan bencana banjir melalui pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari William N. Dunn (William N. Dunn, 2003) yang menyatakan bahwa evaluasi memiliki enam aspek kriteria, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bandung jika terjadi bencana banjir di kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kesiapsiagaan bencana banjir di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif karena ingin memberikan gambaran permasalahan yang ada di

lapangan secara jelas dan akurat. Menurut Sugiyono (2007:8) “penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting)”. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengembangkan teori dari data yang dikumpulkan. Pendekatan ini disebut induktif karena teori dibangun dari data, bukan sebaliknya.

Peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling dalam pengambilan sampel sumber data, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan memperhatikan beberapa pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta Analis Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten Bandung, Taruna Siaga Bencana serta empat orang masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Analisisnya menggunakan teori evaluasi dari William N. Dunn (William N. Dunn, 2003) yang menyatakan bahwa evaluasi memiliki enam aspek kriteria, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis evaluasi pelaksanaan kesiapsiagaan bencana banjir di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat menggunakan pendapat William N. Dunn yang menyatakan bahwa evaluasi memiliki enam aspek kriteria, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Efektifitas

Konsep efektivitas merujuk pada pencapaian hasil yang diinginkan dalam penanganan bencana banjir yang didasarkan pada pandangan dan pemahaman peneliti. Konsep ini berarti bahwa hasil harus tercapai sesuai dengan rencana dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan Standar Operasional yang ditetapkan dalam penanganan bencana banjir sehingga proses dapat berjalan dengan baik.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung terhadap efektivitas hasil terhadap perencanaan yang diharapkan dari langkah-langkah setelah selesai melaksanakan tugas dalam bentuk pencegahan maupun kesiapsiagaan bencana banjir. Tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan bencana banjir, BPBD Kabupaten Bandung meninjau prediksi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Ketika memasuki musim penghujan bencana hidrometeorologis tidak bisa dihindari karena dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, akan tetapi dapat dikurangi risiko kerugiannya.

Tabel 1

Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2023

No	Tahun Kejadian	Jumlah Kejadian	Jiwa Terdampak
1	2021	111	214.244
2	2022	93	47.141
3	2023	61	62.600
	Total	265	323.985

Sumber: BPBD Kab. Bandung (2023)

Tabel diatas menunjukkan Kabupaten Bandung mengalami kejadian bencana banjir yang tidak dapat diprediksi. Dalam pelaksanaannya dapat dilihat bahwa jumlah kejadian bencana banjir dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan jumlah kejadian, akan tetapi korban yang terdampak dari bencana banjir di Kabupaten Bandung mengalami kejadian yang fluktuatif

dimana mengalami penurunan jiwa yang terdampak dari tahun 2021 ke tahun 2022 namun mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023.

Langkah kebijakan program yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung dalam melakukan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yaitu dengan terus melakukan pemantauan, terutama pada masyarakat yang terdampak. Selanjutnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan secara massif dilakukan pemberian informasi kebencanaan, edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Selain itu, BPBD Kabupaten Bandung dibantu oleh peran pentahelix dalam pelaksanaan kesiapsiagaan bencana banjir.

3.2 Efisiensi

BPBD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan usahanya harus secara efisiensi. Efisiensi dalam melaksanakan pencegahan maupun kesiapsiagaan menurut pandangan peneliti adalah terwujudnya tujuan yang didasari dari hasil yang diinginkan dengan meminimalisir usaha yang dilakukan.

Dalam penanganan penanggulangan bencana perlu dilakukan seefisiensi mungkin. Pengukuran Efisiensi sumber daya yang ada dilingkup BPBD Kabupaten Bandung berkaitan dengan Personil, Anggaran dan Sarana Prasarana. BPBD Kabupaten Bandung dapat bekerja secara optimal jika mengefisiensikan peran dan kinerja para pegawai maupun relawan yang turun ke lapangan.

peneliti mendapatkan informasi dari BPBD Kabupaten Bandung bahwa berdasarkan Peta jabatan yang tertuang dalam Analisa Jabatan dan Analisa Kebutuhan (Anjab/ABK) bahwa pada tahun 2021-2026 Pegawai BPBD Kabupaten Bandung yang di butuhkan lebih kurang sebanyak 127 orang, namun pada kenyataannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai Kinerja di laksanakan oleh 82 orang terdiri dari PNS berjumlah 27 orang dan Non PNS sebanyak 55 orang.

Ukuran keberhasilan efisiensi dapat dinilai juga dari anggaran atau biaya yang dikeluarkan dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dapat dikatakan efisien ketika untuk mencapai target kinerja dalam pelaksanaannya mengeluarkan anggaran atau biaya yang kecil. Berdasarkan data dari LAKIP BPBD Kabupaten Bandung 2023, Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran tahun 2023 mengacu pada dua sasaran strategis yaitu yang pertama meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana yang memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran antara lain Indeks Kapasitas Daerah dan Persentase peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat yang terkena dampak bencana dimana penyerapan anggaran pada tahun 2023 sebesar 92,68% dai target kinerja sebesar 100% sehingga memiliki tingkat efisiensi sebesar 7,32%. Sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu Nilai SAKIP, Nilai IKM dan Persentase BMD dalam kondisi baik memiliki penyerapan anggaran sebesar 87,43% dari target kinerja sebesar 100% sehingga memiliki tingkat efisiensi sebesar 12,57 persen.

Berdasarkan data efisiensi penggunaan sumber daya anggaran di atas jumlah sasaran yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya yang efektif menunjukkan bahwa anggaran telah mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran publik juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, salah satunya untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah efektifnya pengelolaan anggaran.

Tabel 2

Daftar Barang Operasional Penanganan Bencana Banjir 2023

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil Resque	3
2	Motor KLX	7

3	Helm Safeti Rescue Air	30
4	Flexsible Buoy	5
5	Gergaji Mesin Kecil	5
6	Perahu Viber LCR	2
7	Perahu Karet	6
8	Mesin Pompa Air	10
9	Selang Hisap	2
10	Selang Buang	6
11	Torpedo Buoy	5

Sumber: BPBD Kab. Bandung (2023)

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari BPBD Kabupaten Bandung bahwa ketersediaan sarana guna penanganan bencana banjir dapat dikatakan terbatas. Manajemen penggunaan sarana yang ada harus diefisiensikan agar penanganan bencana dapat diatasi dengan cepat dan maksimal.

Langkah pelaksanaan komando perintah pencegahan dan kesiapsiagaan bencana banjir dan juga peran masyarakat di dalamnya pertama dengan dibuatnya surat perintah dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, kemudian menugaskan kembali personil terkait untuk melaksanakan kesiapsiagaan baik dengan pelatihan, penyuluhan, diseminasi, maupun informasi kebencanaan kepada masyarakat Kabupaten Bandung baik melalui media sosial maupun surat himbauan.

dalam melaksanakan tugasnya BPBD Kabupaten Bandung melakukan usaha yang cukup baik dalam penanganan bencana termasuk dalam bentuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Distribusi pegawai dalam penanganan dilakukan secara merata dimana sesuai kebutuhan dan keadaan lapangan yang dibantu juga oleh relawan. Personil yang ditugaskan berperan aktif untuk memberikan pelatihan, penyuluhan, diseminasi, maupun informasi kebencanaan kepada masyarakat dalam bentuk kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Penggunaan anggaran dan sarana penunjang digunakan sesuai keperluan sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

3.3 Kecukupan

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam bentuk pencegahan dan kesiapsiagaan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pencapaian pencegahan dan kesiapsiagaan bencana banjir. Permasalahan yang timbul akibat bencana dapat diselesaikan dengan suatu perencanaan agar mendapatkan hasil yang diinginkan.

Pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana BPBD Kabupaten Bandung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) pelayanan dasar sub-urusan bencana terdiri dari: pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Tabel 3

Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,56	0,56
	Persentase peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat yang terkena dampak bencana	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan	Nilai SAKIP dan Nilai IKM	72	77,60
		77	83,43

Penyelenggara Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase BMD Kondisi Baik	80%	48,64
---	-----------------------------	-----	-------

Sumber : LKIP BPBD Kab. Bandung 2023

Program prioritas Indeks Kapasitas Daerah (IKD) BPBD Kabupaten Bandung antara lain: pengkajian resiko dan perencanaan terpadu; perkuatan kebijakan dan kelembagaan; pengembangan sistem informasi diklat dan logistik; peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; penanganan tematik kawasan rawan bencana; pengembangan sistem pemulihan bencana; dan peningkatan kesiapsiagaan dan pengembangan darurat bencana. Dilihat dari tabel 4.10, bahwa capaian kinerja BPBD Kabupaten Bandung mencapai hasil yang diinginkan dalam realisasinya sesuai atau bahkan melebihi dari target yang dibuat.

Peneliti melakukan observasi di daerah yang terjadi tanggul jebol saat sedang meneliti di BPBD Kabupaten Bandung tepatnya di daerah Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Kejadian tanggul jebol ini terjadi karena derasnya luapan arus Sungai Cigede akibat hujan besar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024. Akibat kejadian ini pemukiman warga terendam banjir mencapai 2 (dua) meter di dalam rumah. Dalam kejadian ini BPBD Kabupaten Bandung langsung bereaksi cepat dengan mengirimkan personil juga mengarahkan tim relawan untuk melakukan evakuasi juga melakukan komando untuk mengkoordinasikan penanganan bencana dengan OPD dan unsur terkait.

3.4 Perataan

Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana banjir perlu dilakukan untuk mengurangi risiko kejadian dan kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana. Dalam proses perataan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, BPBD Kabupaten Bandung melakukan upaya membuat kebijakan untuk masyarakat antara lain :

- 1) Melakukan pelayanan informasi rawan bencana untuk masyarakat, baik melalui surat elektronik maupun media sosial.
- 2) Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kepada penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.
- 3) Melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana untuk tim relawan dan masyarakat.
- 4) Kontrol operasi dan penyediaan fasilitas kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 5) Penguatan kapasitas wilayah untuk pencegahan dan kesiapsiagaan dengan membentuk 3 (dua) desa tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana.
- 6) Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana yang dikembangkan, meningkatnya partisipasi mengikuti bimtek TRC, sekolah gunung dan sungai juga SAR dari masyarakat

Tahapan upaya yang sudah dilakukan BPBD Kabupaten Bandung sudah cukup baik dan efektif dilihat dari kebijakan yang merata kepada masyarakat yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh daerah tersebut. Dari sisi masyarakat pun sudah memiliki kesadaran akan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Regulasi penganggaran mengacu pada anggaran pemerintah daerah, penganggaran sudah diatur sedemikian rupa secara rutin, ganti rugi bagi warga yang terkena dampak bencana dapat menggunakan dana rutin dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung atau saat darurat dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga dalam keadaan yang masif yang dapat mengganggu penghidupan saat status tanggap darurat. Tim jitupasna atau bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bertugas menghitung kerugian, Dilaporkan ke PUPR atau Disperkimtan, yang menentukan masuk ke kategori rusak ringan, sedang atau berat. saat masuk kategori ringan BPBD oleh dinas tersebut yang melakukan verifikasi.

usaha perataan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan BPBD Kabupaten Bandung untuk memberikan biaya, manfaat, dan kebijakan yang didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda yang peneliti dapatkan dari LKIP BPBD Kabupaten Bandung tahun 2023, peningkatan layanan untuk penduduk yang terkena dampak bencana berupa warga negara yang menerima layanan informasi rawan bencana sebanyak 1.506.013 orang, warga negara yang menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 1.058.718 orang dan jumlah warga negara yang menerima layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 808.718 orang. BPBD Kabupaten Bandung juga melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (terpasangnya rambu-rambu kebencanaan), Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan (terbentuknya 3 Desa Tangguh Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana), Penanganan Pascabencana, Bimtek TRC, SAR, Sekolah Gunung dan sungai, Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, respon cepat darurat bencana serta pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

3.5 Responsivitas

Penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja melainkan urusan bersama yang ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Responsivitas menurut pandangan penulis merupakan usaha berbagai pihak dalam memberikan tanggapan dari kinerja BPBD. Oleh karena itu, konsep pentahelix harus bekolaborasi dimana pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media maupun masyarakat harus bersatu dalam penanganan penanggulangan bencana bekerja sama dengan BPBD.

Salah satu fungsi dari BPBD yaitu fungsi komando, dimana BPBD memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi operasi penanggulangan bencana secara terintegrasi, yang mencakup pengambilan keputusan yang tepat sebelum, saat dan setelah bencana.

Bencana tidak dapat diantisipasi kedatangannya dan dapat terjadi di waktu yang tidak diduga, sehingga dibutuhkan peran seluruh unsur dalam penanganannya yang memiliki peran masing-masing. BPBD Kabupaten Bandung menerapkan pola kerjasama pentahelix seperti pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media dan masyarakat harus berkolaborasi dalam menangani bencana. BPBD harus selalu siap dimanapun dan kapanpun saat ada laporan kejadian bencana karena penanganan bencana harus segera ditangani sebelum memberikan dampak yang lebih besar, oleh karena itu BPBD selalu menerapkan respon time 60 menit sejak laporan diterima dan bekerja 7x24 jam. Tim yang ditugaskan turun ke lapangan selalu dibantu tim relawan bencana dan juga masyarakat saat situasi sedang tanggap darurat sehingga dalam penanganannya selalu bekerja efektif dan efisien. BPBD selalu memastikan masyarakat dalam keadaan siap menghadapi bencana dengan memberikan informasi bencana, sosialisasi dan edukasi, terutama berkomunikasi dengan tim relawan bencana juga kepala desa di daerah tersebut. BPBD melakukan pendataan dan menanyakan kondisi masyarakat yang menjadi korban, baik korban luka luka maupun korban yang mengalami kerugian akibat bencana.

Tim Relawan Bencana dibentuk oleh BPBD Kabupaten Bandung di tiap desa agar seluruh wilayah di Kabupaten Bandung dapat terawasi dan mendapatkan respon cepat jika ada tanda akan terjadinya bencana. Tim Relawan Bencana diberikan pelatihan yang mumpuni untuk memiliki pengetahuan bagaimana pelaksanaan yang bisa dilakukan warga dalam bentuk pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan evakuasi dalam menghadapi bencana. Tim Relawan Bencana juga mendapatkan informasi kebencanaan secara berkelanjutan dari Kabupaten BPBD Bandung.

Upaya antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung dalam menghadapi kemungkinan bencana di masa mendatang, dilakukan melalui beberapa pendekatan. terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap penanggulangan bencana seperti dari unsur Relawan Bencana, Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB), taruna

siaga bencana (tagana) merupakan sumber daya yang berharga bagi pelaksanaan penanggulangan bencana.

3.6 Ketepatan

Dalam pelaksanaan penanganan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Bandung tidak jarang ditemukan sejumlah kendala sehingga diperlukan bentuk usaha melaksanakan kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya.

Dalam menjalankan pelaksanaan kesiapsiagaan bencana banjir BPBD Kabupaten Bandung melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 yaitu mengenai Standar Teknis Pelayanan Minimal sub urusan kebencanaan:

1) Pelayanan informasi rawan bencana

Semaksimal mungkin ketika menghadapi kendala saat penanganan bencana banjir BPBD Kabupaten Bandung mengupayakan membuat peta rawan bencana dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat melalui berbagai media seperti situs resmi dalam website <https://bpbdbandungkab.go.id/> dan juga pada sosial media instagram, twitter dan facebook resmi BPBD Kabupaten Bandung @bpbdbandung. Selain itu, upaya lain dalam bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam hidrometeorologi, BPBD Kabupaten Bandung selalu menerbitkan surat edaran Bupati. Hal ini ditunjukkan ketika pada tahun 2022 kondisi prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, diprediksi akan terjadi puncak musim penghujan pada bulan Januari dan Februari 2023, sehingga Bupati Kabupaten Bandung menerbitkan Surat Edaran (SE) No. BC.02./3731/BPBD tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Alam di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Upaya lain juga dilakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam menginformasikan kebencanaan,

2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

Sebagai tindak lanjut dari penyebaran informasi BPBD Kabupaten Bandung melakukan langkah langkah upaya pencegahan dan kesiapsiagaan yaitu menyusun rencana aksi yang bermanfaat bagi pelaksanaan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, secara khusus memberikan pelatihan untuk tim relawan, sosialisasi dan edukasi masyarakat dan juga memasang rambu rambu kebencanaan di daerah Pangalengan, Majalaya, Ibum, Kertasari, Cimaung, Kutawaringin, Soreang, Bojongsoang, Dayeuhkolot, dan Baleendah. Daerah tersebut merupakan paling rawan terjadi bencana. Pemasangan rambu diprioritaskan di daerah dengan kerawanan bencana yang berpotensi menimbulkan korban jiwa seperti longsor, gempa, dan banjir bandang.

Selain itu BPBD Kabupaten Bandung melakukan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan membangun Desa Tangguh Bencana di daerah Desa Tenjolaya Cicalengka, Desa Kutawaringin, Kelurahan Pasawahan, Desa Ciburial Cimenyan, Desa Majalaya, Desa Lamajang Pangalengan, Desa Panenjoan Cicalengka, Desa Nanjungmekar Rancaekek, Desa Citaman Nagreg, dan Desa Nanjung mekar. Desa tangguh bencana memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Dalam pelaksanaan evakuasi BPBD Kabupaten Bandung melakukan penanganan secara cepat setelah ada laporan kejadian bencana juga dengan memberikan bantuan bagi korban yang terkena dampak bencana banjir sebagai bentuk memenuhi kebutuhan dasar dalam masa tanggap darurat.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan teori William N Dunn pelaksanaan kesiapsiagaan bencana banjir dari segi efektivitas pelaksanaan kesiapsiagaan telah dilaksanakan dengan baik dengan upaya meningkatkan kapasitas masyarakat agar siap saat menghadapi bencana banjir. Dari segi efisiensi penggunaan sumber daya mulai dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga anggaran digunakan sesuai kebutuhan sesuai keperluan dengan keterbatasan yang dimiliki. Kecukupan dalam pelaksanaannya sesuai dengan SOP yang berlaku yang berpedoman kepada Permendagri Nomor 101 Tahun 2018. Dari segi perataan BPBD Kabupaten Bandung memberikan bantuan pelayanan dan informasi didistribusikan secara merata kepada masyarakat dalam bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Responsivitas dari BPBD Kabupaten Bandung berjalan dengan cepat dikarenakan dibantu oleh unsur pentahelix terutama tim relawan bencana dan masyarakat yang bekerjasama dengan baik. Dari segi ketepatan program yang dilakukan BPBD Kabupaten Bandung sudah terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan juga pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kesiapsiagaan bencana banjir di Kabupaten Bandung dikatakan berjalan baik dengan dilakukannya program pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana meskipun masih terkendala sarana dan prasarana terbatas, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan terbatasnya penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat. Pelaksanaan kesiapsiagaan bencana banjir di Kabupaten Bandung dari segi efektivitas, ketepatan, efisiensi, perataan, kecukupan dan responsivitas bisa dikatakan baik, hal ini didukung dengan peran pemerintah juga seluruh peran pentahelix. Guna meningkatkan kesiapsiagaan bencana banjir perlu melakukan perekrutan dan pelatihan SDM, Perawatan sarana dan prasarana dan peningkatan penyebaran informasi dan komunikasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu desa saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat William N. Dunn.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan kesiapsiagaan bencana banjir di Kabupaten Bandung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada dosen pembimbing, orang tua penulis serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Esriani, Esi (2022) Kesiapsiagaan Santri Tingkat Tsanawi Dalam Menghadapi Bencana Alam Gempa Bumi di Lingkungan Pondok Pesantren Riyadlul Huda Desa Sukarapah Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

Ristiani, Ida Yunari (2020) Manajemen Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Potensi Bencana di Kabupaten Sumedang. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik. Vol. 2, No. 2, Agustus 2020.

Ian Hot Oloan Sitorus, Filsa Bioresita, dan Noorlaila Hayati (2021) Analisa Tingkat Rawan Banjir di Daerah Kabupaten Bandung Menggunakan Metode Pembobotan dan Scoring Jurnal Teknik ITS Vol. 10, No. 1, ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)

Taryana, Agus, Muhammad Rifa El Mahmudi, Herjanto Bekti (2022) Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Jakarta

Nabilah, Adila (2020) Identifikasi Tingkat Kerawanan Bencana Banjir Di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

Dori, Sukma Agus (2020) Identifikasi Wilayah Rawan Genangan Banjir, Penyebab dan Upaya Penanggulangannya di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman. Diploma thesis, Universitas Andalas

Armando, Satria surya dan Lukman Arif (2023) Mitigasi Bencana Banjir Secara Terpadu dan Kolaboratif. Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 2023

Utami, Rosan Cahya dan Wido Prananing Tyas (2021) Bentuk Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam Banjir Bandang Suku Wana Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol. 17, No.1, 2021, 1-15

Alzair, Nur dan Erikha Maurizka Mayzarah (2022) Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Banjir di Kelurahan Wosi Manokwari Papua Barat. Jurnal Georafflesia Vol.7 No.1 Juni 2022 27-31

Gultom, Andri Fransiskus, Ludovikus Bomans Wadu dan Fahmi Arif Zakaria Strategi Warga Negara dalam Upaya Pencegahan Bencana Banjir di Desa Tawangrejeni, Turen, Kabupaten Malang. Vol. 8 No. 1 (2023): Juni

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Bandung tahun 2021 – 2026

